



LAPORAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)

SEMESTER I - TAHUN 2022
NO. 17/LAP/PK/KI/01.05/06/2022

KATA PENGANTAR

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Komisi Yudisial Republik Indonesia mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa persepsi korupsi dalam hal kualitas bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi korupsi yang diterima dengan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam persepsi korupsi di Komisi Yudisial Republik Indonesia, yang diambil melalui kuesioner.

Berdasarkan hasil survei, masih diperlukan perbaikan terhadap kualitas pelayanan. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak.

Jakarta, 28 Juni 2022
Ketua Tim Penilai Internal,



R. Adha Pamekas

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud Dan Tujuan.....	1
C. Landasan Hukum.....	2
D. Rencana Kerja	2
METODOLOGI.....	4
A. Metode Penelitian	4
B. Populasi Dan Sampel	4
C. Teknis Analisis Data	4
D. Tahapan Pelaksanaan.....	5
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	7
A. Profil Responden	7
1. Tingkat Pendidikan Responden	7
2. Jenis Pekerjaan Responden.....	7
3. Kelompok Usia Responden	8
B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator	9
1. Indikator Manipulasi Peraturan.....	9
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan	9
3. Indikator Menjual Pengaruh.....	10
4. Indikator Transaksi Biaya	10
5. Indikator Biaya Tambahan.....	11
6. Indikator Hadiah	11
7. Indikator Transparansi Pembayaran	12
8. Indikator Percaloan.....	12
9. Indikator Perbuatan Curang	13
10. Indikator Transaksi Rahasia	13
C. Indeks Persepsi Korupsi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.....	14
PENUTUP	15
A. KESIMPULAN.....	15
B. REKOMENDASI	15
LAMPIRAN.....	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi	6
Tabel 2. Nilai Persepsi.....	6
Tabel 3. Indeks Persepsi Korupsi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.....	15

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas	5
Gambar 2. Tingkat Pendidikan Responden.....	7
Gambar 3. Jenis Pekerjaan Responden.....	8
Gambar 4. Kelompok Usia Responden	8
Gambar 5. Indikator Manipulasi Peraturan.....	9
Gambar 6. Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	9
Gambar 7. Indikator Menjual Pengaruh.....	10
Gambar 8. Indikator Transaksi Biaya	10
Gambar 9. Indikator Biaya Tambahan.....	11
Gambar 10. Indikator Hadiah.....	11
Gambar 11. Indikator Transparansi Pembayaran	12
Gambar 12. Indikator Percaloan.....	12
Gambar 13. Indikator Perbuatan Curang	13
Gambar 14. Indikator Transaksi Rahasia	13
Gambar 15. Indeks Persepsi Korupsi Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim.....	14

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi salah satu pencapaian sasaran hasil utama, yaitu pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Komisi Yudisial menetapkan Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim sebagai *pilot project*. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan laporan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan KorupsiJangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

D. Rencana Kerja

Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana.
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya.
- Penyiapan Bahan.
 - Kuesioner;
 - Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
 - Kelengkapan peralatan.

- Penetapan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data.
 - Jumlah responden;
 - Lokasi dan waktu pengumpulan data.
- Penyusunan Jadwal.
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

Pelaksanaan Pengumpulan

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 (enam) bulan (dua kali dalam satu tahun).

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim. Teknik sampel menggunakan Teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah Teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, tentunya orang tersebut pernah menerima layanan yang diberikan oleh Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim.

C. Teknis Analisis Data

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap periodenya. Teknik analisis

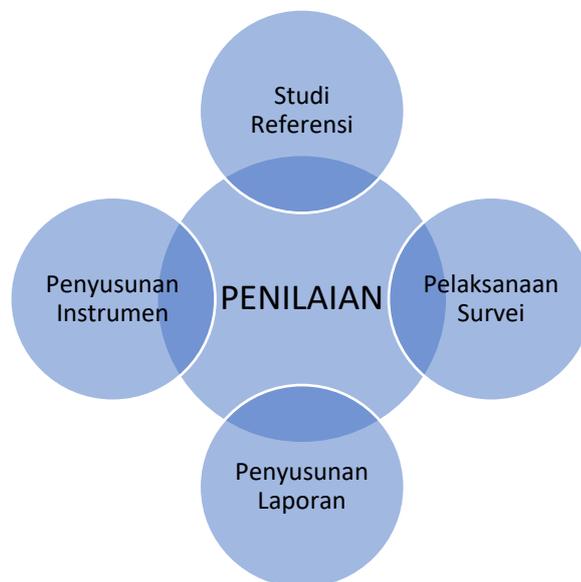
perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pertama
Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.
- Kedua
Mencari bobot rata-rata setiap indikator.
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 - 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

D. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur digambarkan dalam bagan di bawah ini:



Gambar 1. Model Alur Penyusunan Survei IPK Menuju Zona Integritas

Tabel 1. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi

NO	RUANG LINGKUP
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Pembayaran
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2. Nilai Persepsi

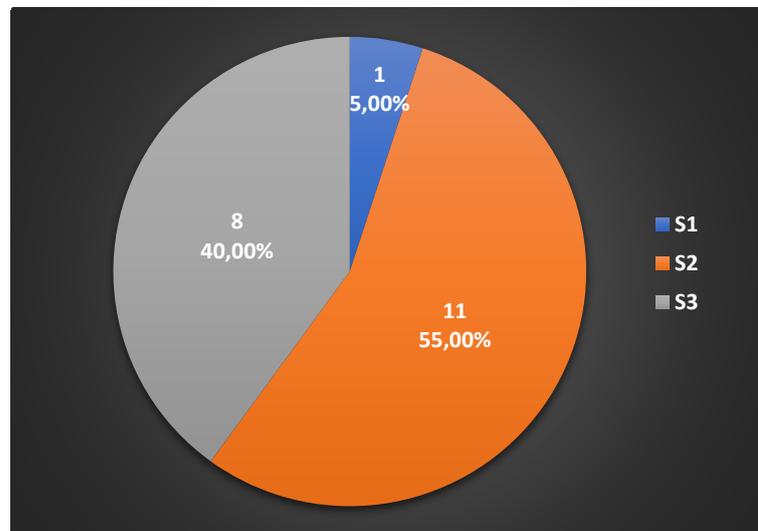
NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1,00 – 1,75	25,00 – 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	4	Bersih dari korupsi

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

A. Profil Responden

1. Tingkat Pendidikan Responden

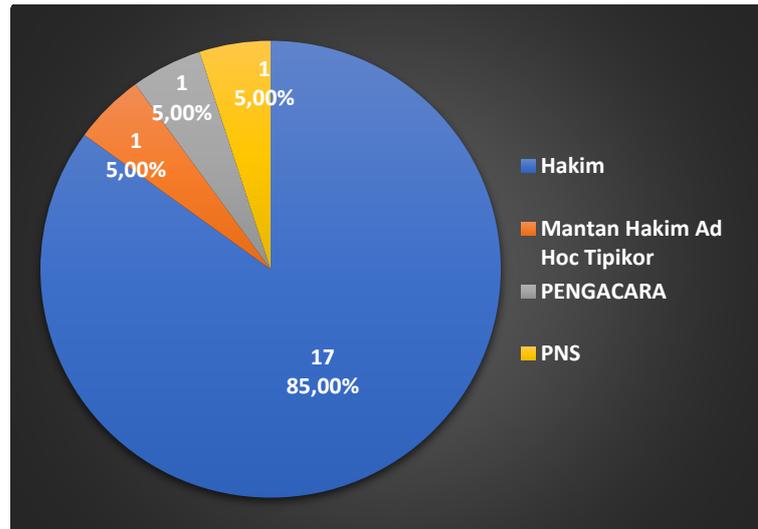
Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial mayoritas memiliki latar pendidikan terakhir Strata-2 (S2) sebanyak 11 responden (55,00%) dari total 20 responden.



Gambar 2. Tingkat Pendidikan Responden

2. Jenis Pekerjaan Responden

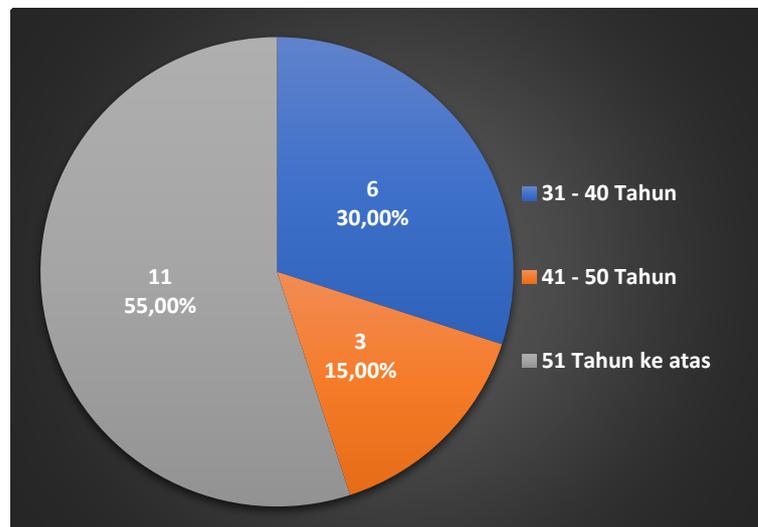
Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 85,00% responden pengguna layanan pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial memiliki pekerjaan Hakim.



Gambar 3. Jenis Pekerjaan Responden

3. Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia 51 Tahun ke atas, yaitu sebesar 55,00%.

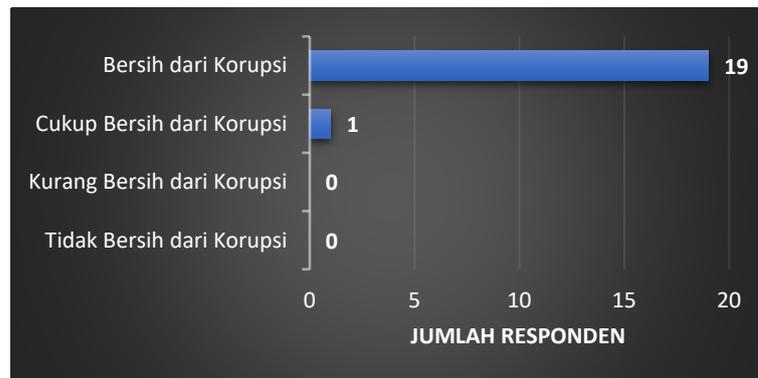


Gambar 4. Kelompok Usia Responden

B. Indeks Persepsi Korupsi Per Indikator

1. Indikator Manipulasi Peraturan

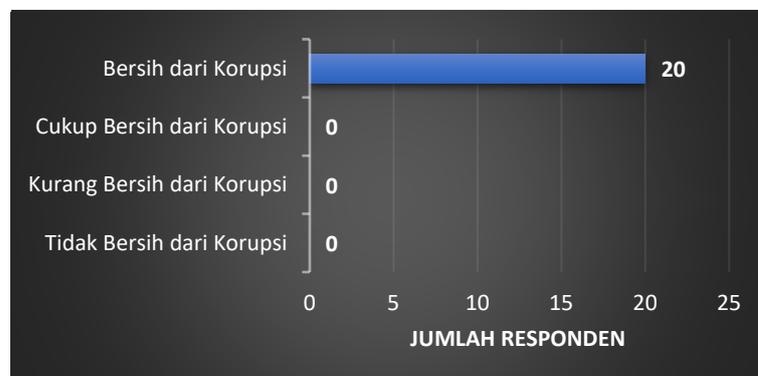
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,95 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 98,75%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Manipulasi Peraturan.



Gambar 5. Indikator Manipulasi Peraturan

2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

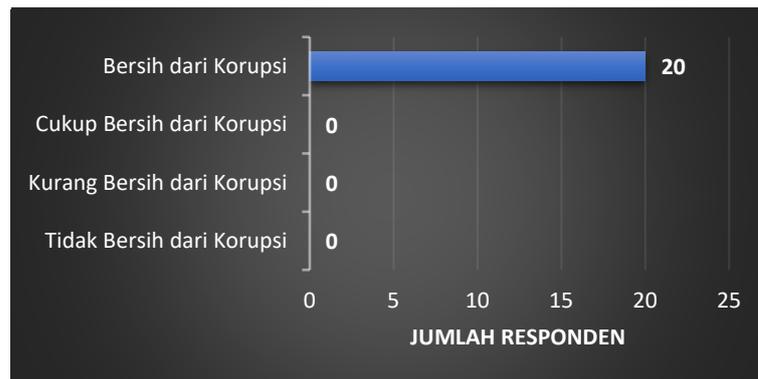
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 100,00%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Penyalahgunaan Jabatan.



Gambar 6. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

3. Indikator Menjual Pengaruh

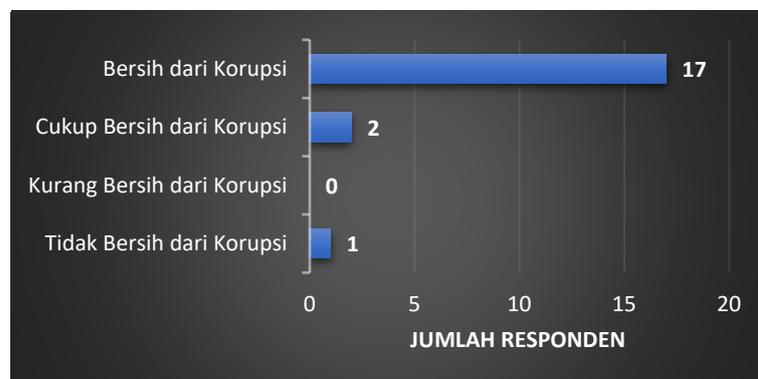
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 100,00%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Menjual Pengaruh.



Gambar 7. Indikator Menjual Pengaruh

4. Indikator Transaksi Biaya

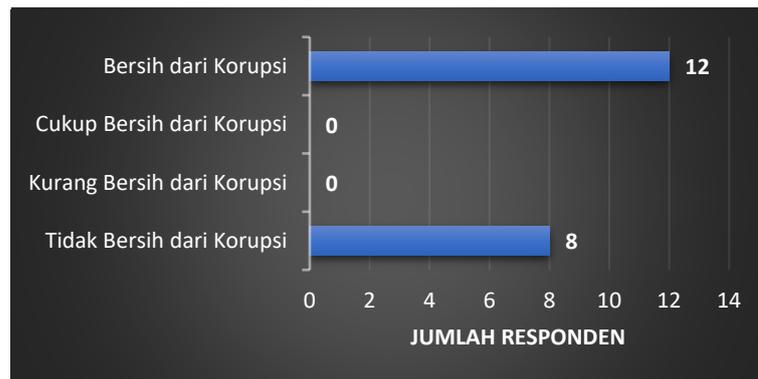
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,75 berada pada nilai interval 2,51 s/d 3,25 atau nilai konversi 93,75%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Transaksi Biaya.



Gambar 8. Indikator Transaksi Biaya

5. Indikator Biaya Tambahan

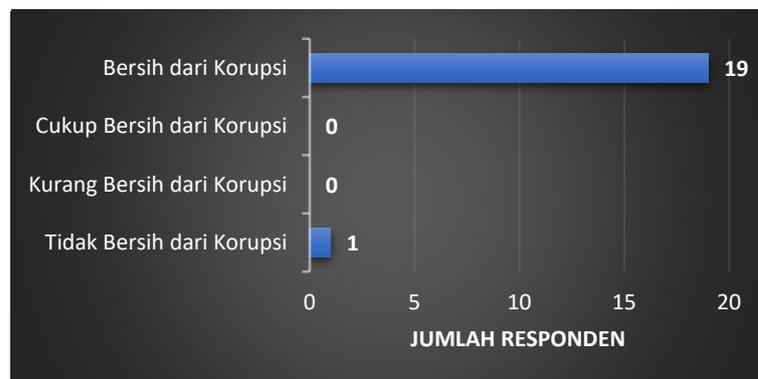
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 2,80 berada pada nilai interval 2,51 s/d 3,25 atau nilai konversi 70,00%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Cukup Bersih dari Korupsi atas Biaya Tambahan.



Gambar 9. Indikator Biaya Tambahan

6. Indikator Hadiah

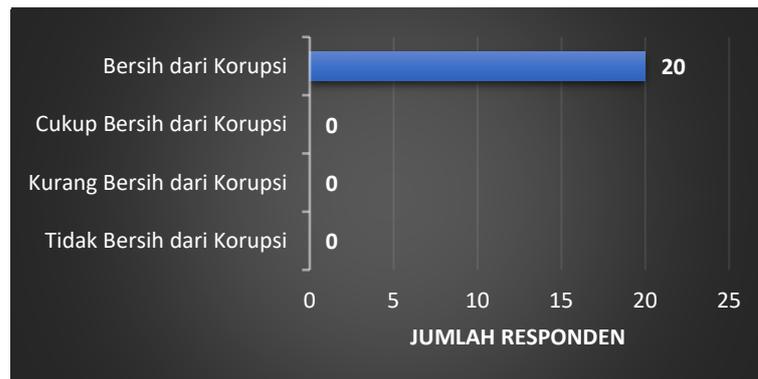
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,85 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 96,25%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Hadiah.



Gambar 10. Indikator Hadiah

7. Indikator Transparansi Pembayaran

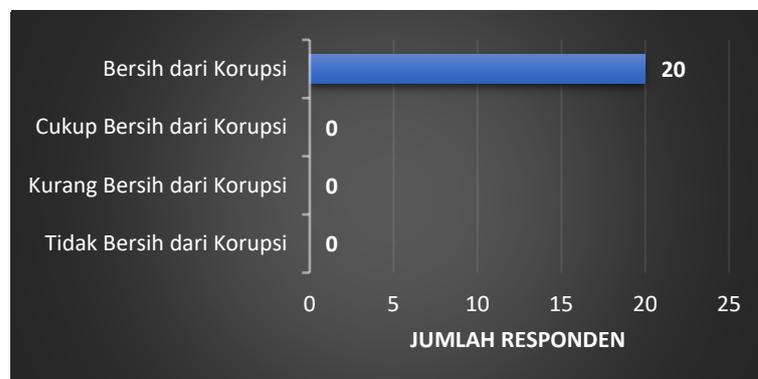
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 100,00%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Transparansi Pembayaran.



Gambar 11. Indikator Transparansi Pembayaran

8. Indikator Percaloan

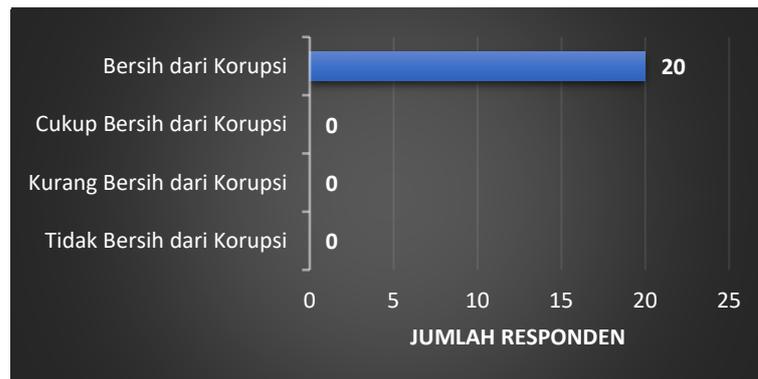
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 100,00%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Percaloan.



Gambar 12. Indikator Percaloan

9. Indikator Perbuatan Curang

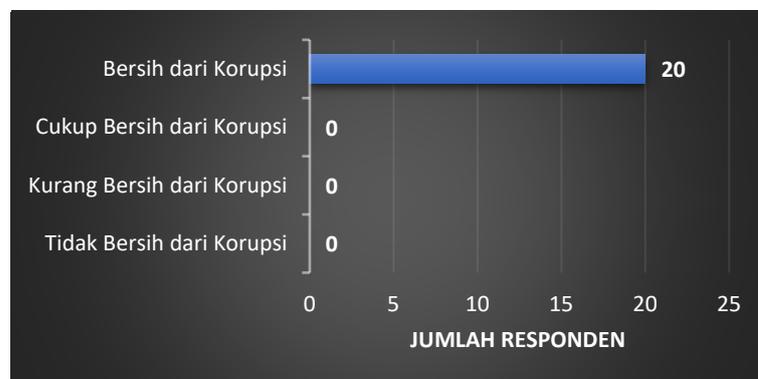
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 100,00%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Perbuatan Curang.



Gambar 13. Indikator Perbuatan Curang

10. Indikator Transaksi Rahasia

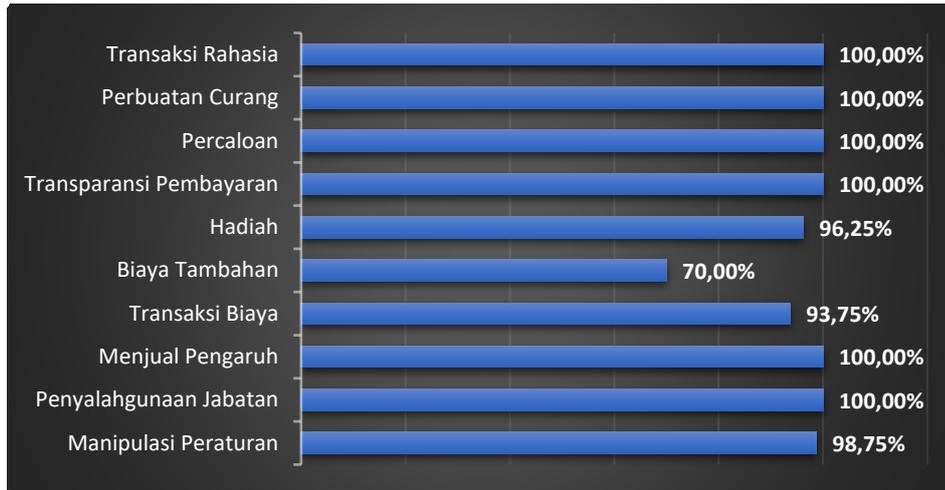
Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 4,00 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 100,00%. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Bersih dari Korupsi atas Transaksi Rahasia.



Gambar 14. Indikator Transaksi Rahasia

C. Indeks Persepsi Korupsi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial sebesar 3,84 berada pada nilai interval 3,26 s/d 4,00 atau nilai konversi 95,88%.



Gambar 15. Indeks Persepsi Korupsi Biro Rekrutmen, Advokasi Dan Peningkatan Kapasitas Hakim

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi yang telah dilakukan, diperoleh informasi bahwa pada Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial memiliki Indeks Persepsi Korupsi 3,84 atau masuk pada kategori Bersih dari Korupsi.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks berikut:

Tabel 3. Indeks Persepsi Korupsi Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

NO	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI INDEKS	KATEGORI	RANK
1	Manipulasi Peraturan	3,95	Bersih dari Korupsi	7
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	Bersih dari Korupsi	1
3	Menjual Pengaruh	4,00	Bersih dari Korupsi	2
4	Transaksi Biaya	3,75	Bersih dari Korupsi	9
5	Biaya Tambahan	2,80	Cukup Bersih dari Korupsi	10
6	Hadiah	3,85	Bersih dari Korupsi	8
7	Transparansi Pembayaran	4,00	Bersih dari Korupsi	3
8	Percaloan	4,00	Bersih dari Korupsi	4
9	Perbuatan Curang	4,00	Bersih dari Korupsi	5
10	Transaksi Rahasia	4,00	Bersih dari Korupsi	6

B. REKOMENDASI

Merujuk pada hasil indeks persepsi korupsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim Komisi Yudisial Semester 1 Tahun 2022, menunjukkan bahwa rata-rata indikator memiliki indeks 3,84 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi.

Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator biaya tambahan memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pelayanan dalam hal tersebut.

LAMPIRAN

**Kuesioner
Survei Indeks Persepsi Korupsi
dan Kepuasan Layanan**

Komisi Yudisial RI



Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Kepuasan Layanan

Unit Layanan Biro Rekrutmen, Advokasi dan Peningkatan Kapasitas Hakim

✉ Inspektorat.ky@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#)

* Wajib

Profil Responden

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Perempuan

Usia *

20 Tahun ke bawah

21 - 30 Tahun

31 - 40 Tahun

41 - 50 Tahun

51 Tahun ke atas

Pendidikan *

SD

SMP

SMA

S1

S2

S3

Pekerjaan *

Hakim

PNS

TNI

POLRI

Swasta

Wira Usaha

Yang lain: _____

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.

Konten ini tidak dibuat atau didukung oleh Google. [Laporkan Penyalahgunaan](#) - [Persyaratan Layanan](#) - [Kebijakan Privasi](#)

Google Formulir



**Kuesioner
Survei Indeks Persepsi Korupsi
dan Kepuasan Layanan
Komisi Yudisial RI**

Survei Indeks Persepsi Korupsi dan Kepuasan Layanan

inspektorat.ky@gmail.com (tidak dibagikan) [Ganti akun](#)

* Wajib

Pendapat Responden Tentang Persepsi Korupsi

Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? *

1 2 3 4

Tidak Pernah Selalu

Apakah dalam memperoleh layanan, petugas meminta imbalan tertentu? *

1 2 3 4

Selalu Tidak Pernah

Pernahkah dihubungi oleh seseorang (petugas/karyawan) yang akan membantu * dengan meminta imbalan?

1 2 3 4

Selalu Tidak Pernah

Apakah anda selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? *

1 2 3 4

Tidak Pernah Selalu

Apakah anda tidak pernah dipungut biaya (gratis)? *

1 2 3 4

Selalu Tidak Pernah

Apakah anda memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)? *

1 2 3 4

Selalu Tidak Pernah

Apakah saudara mengetahui/dijelaskan oleh petugas bahwa dalam pengurusan * layanan tidak dipungut biaya?

1 2 3 4

Tidak Mengetahui Mengetahui

Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan? *

1 2 3 4

Selalu Tidak Pernah

Apakah pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktik KKN? *

1 2 3 4

Selalu Tidak Pernah

Apakah pernah melakukan pertemuan dengan petugas di luar kantor komisi yudisial, untuk membahas layanan yg sedang dtangani? *

1 2 3 4

Selalu Tidak Pernah

Selanjutnya, Saudara dapat memberikan saran - saran perbaikan agar Komisi Yudisial bisa meningkatkan kualitas pelayanannya.

Jawaban Anda

Kosongkan formulir

Jangan pernah mengirimkan sandi melalui Google Formulir.
 Konten ini tidak dibuat atau dibagikan oleh Google. [Laporan Penyalahgunaan](#) - [Pencarian Layanan](#) - [Subsidiaritas](#) - [Bantuan](#)

Google Formulir

NILAI PERUNSUR RESPONDEN											
NO	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	TOTAL
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
2	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	3,70
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,60
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,50
5	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4,00
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,70
7	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4	4,00
8	4	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4,00
9	3	4	4	3	1	4	4	4	4	4	4,00
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,70
11	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4,00
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,40
15	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	3,70
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4,00
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,70
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3,60
19	4	4	4	4	1	1	4	4	4	4	3,50
20	4	4	4	4	1	4	4	4	4	4	4,00
JUMLAH	79	80	80	75	56	77	80	80	80	80	
N RATA-RATA	3,95	4,00	4,00	3,75	2,80	3,85	4,00	4,00	4,00	4,00	
NRR TERTIMBANG	0,40	0,40	0,40	0,38	0,28	0,39	0,40	0,40	0,40	0,40	3,84

Keterangan:	
Q1 – Q10	: Unsur-unsur Pertanyaan
NRR	: Nilai Rata-rata
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
NRR Per Unsur	: Jumlah nilai per unsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi
IPK : 3,84	

No	Unsur Pertanyaan	Nilai
Q1	Manipulasi Peraturan	3,95
Q2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
Q3	Menjual Pengaruh	4,00
Q4	Transaksi Biaya	3,75
Q5	Biaya Tambahan	2,80
Q6	Hadiah	3,85
Q7	Transparansi Pembayaran	4,00
Q8	Percaloan	4,00
Q9	Perbuatan Curang	4,00
Q10	Transaksi Rahasia	4,00
Nilai Rata-rata		3,84



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA
2022